

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keberhasilan perekonomian dari suatu negara dapat dilihat dari besarnya pendapatan nasional. Pendapatan nasional juga bisa menjadi perbandingan kondisi antar negara dan bahkan menentukan apakah suatu negara berada dalam kelompok negara-negara maju atau negara sedang berkembang. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan. Namun yang sering digunakan dalam analisis makroekonomi adalah perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Menurut Keynes faktor utama dalam perhitungan pendapatan nasional yaitu pengeluaran agregat yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan. Namun dalam analisis makroekonomi modern atau perekonomian terbuka perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran meliputi konsumsi, investasi, Pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor.¹

Dalam teori pendapatan nasional perekonomian terbuka, sirkulasi aliran pendapatan terdiri dari empat sektor yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Pendapatan sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi dan sebagian akan disisihkan dalam bentuk tabungan di lembaga keuangan. Sektor rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi baik tenaga kerja maupun modal. Faktor

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 85

produksi ini nantinya akan digunakan oleh sektor perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Sektor perusahaan akan memberikan imbalan baik berupa gaji, sewa, maupun bunga atas faktor produksi dari rumah tangga. Sektor pemerintah akan memperoleh penerimaan pajak dari sektor rumah tangga dan perusahaan maupun sektor luar negeri dan kemudian dibelanjakan baik berupa barang dan jasa maupun transfer berupa subsidi atau lainnya. Sedangkan sektor luar negeri merupakan tempat berlangsungnya perdagangan internasional meliputi kegiatan ekspor dan impor.

Pada dasarnya sirkulasi aliran pendapatan tersebut menunjukkan arus perputaran uang dan barang atau jasa. Menjaga keseimbangan antara arus perputaran uang dan barang atau jasa tentunya tidak mudah. Ketika salah satu komponen atau sektor terhambat, pada akhirnya akan mempengaruhi arus uang dan barang atau jasa tersebut yang selanjutnya berdampak terhadap kestabilan ekonomi.² Maka dari itu diperlukan seperangkat kebijakan untuk menjaga agar perputaran uang dan barang atau jasa tetap terkendali dan stabil yang salah satunya dengan menggunakan kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan dan disesuaikan kebutuhan, keseimbangan perputaran uang dan pertumbuhan barang atau jasa akan tercapai.³

Kebijakan moneter merupakan pengendalian jumlah uang beredar untuk mencapai tingkat kegiatan perekonomian yang diinginkan seperti stabilitas harga (inflasi) dan output riil (pendapatan nasional). Dalam mencapai sasaran utama kebijakan moneter, bank sentral selaku otoritas moneter menggunakan

² Kartika Sari, *Ruang Lingkup Ekonomi Makro*, (Klaten: Cempaka Putih, 2017), hal.26

³Yan Hanif Jawangga, *Seri Pengayaan Pembelajaran Ekonomi: Ilmu Ekonomi Makro*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2019), hal. 45

beberapa instrumen yaitu operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, giro wajib minimum, dan kebijakan kredit selektif.⁴ Pengaruh dari penerapan instrumen kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh perbankan yang selanjutnya akan disalurkan ke sektor riil. Proses bekerjanya instrumen kebijakan moneter sampai dengan mempengaruhi sektor riil ini disebut dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter.

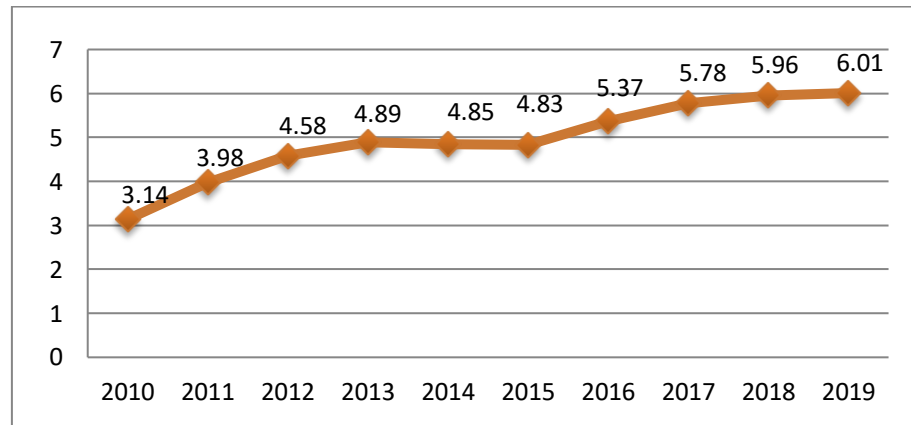
Peran perbankan akan menentukan efektivitas transmisi kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dalam mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perbankan itu sendiri sebagai lembaga intermediasi antara debitur dan kreditur yang berarti berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan disimpan dalam bentuk tabungan di perbankan. Kemudian perbankan menyalurkannya ke dalam bentuk pinjaman atau kredit ke perusahaan untuk diinvestasikan. Kegiatan bank sebagai intermediasi ini akan membantu kelancaran investasi, distribusi, dan konsumsi yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional.

Pada prakteknya di Indonesia menerapkan *dual banking system* dimana terdapat dua jenis usaha bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah ke Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

⁴ Ibid.,hal. 46-47

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sejak saat itu perbankan syariah mengalami perkembangan cukup pesat dimana setiap tahunnya pangsa pasar atau *market share* dan total aset terus mengalami peningkatan.

Grafik 1.1
Market Share Perbankan Syariah tahun 2010-2019
(%)



Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan syariah Indonesia-Otoritas Jasa Keuangan⁵, diambil tahun 2020

Berdasarkan grafik 1.1 nilai *market share* perbankan syariah dalam sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2010 market share perbankan syariah sebesar 3,14 % dan selanjutnya pada tahun 2011 sebesar 3,98%. Peningkatan terus terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,89% dengan total aset BUS, UUS, dan BPRS senilai 248,1 triliun rupiah. Namun pada tahun 2014 nilai *market share* mengalami penurunan sebesar 0,04% dengan total aset 217,9 triliun rupiah. Pada tahun 2015 juga mengalami penurunan senilai 0,02% dengan total aset 304 triliun rupiah. Namun pada tahun 2016 nilai *market share* meningkat sebesar 0,54%

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan syariah Indonesia 2013-2018” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx>, diakses pada 5 Juli 2020 pukul 08.45 WIB

dengan total aset 365,6 triliun rupiah. Kenaikan terus terjadi pada tahun berikutnya yaitu sebesar 0,41% dengan total aset 435,2 triliun rupiah. Begitupun juga pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,18 % dengan total aset 489,69 triliun rupiah. Hingga pada tahun 2019 *market share* perbankan syariah meningkat sebesar 6,01 %.

Berdasarkan grafik tersebut bisa kita lihat bahwa nilai *market share* perbankan syariah cenderung mengalami peningkatan per tahunnya. Sedangkan total aset perbankan syariah juga terus mengalami peningkatan. Kecenderungan bertambahnya tingkat *market share* dan total aset pada perbankan syariah menunjukkan antusiasme masyarakat akan produk dan jasa perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah tersebut menyebabkan transmisi kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi bank konvensional tetapi juga mempengaruhi bank syariah.

Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki wewenang apabila terjadi permasalahan dalam perekonomiannya yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan tingkat output (pendapatan nasional) dalam melakukan pengendalian moneter di luar operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan baik secara konvensional maupun secara syariah.

Dalam teori kebijakan moneter Islam atau syariah bank sentral berkewajiban mendukung pertumbuhan penawaran uang guna memenuhi pembiayaan yang berpotensi dalam pertumbuhan output riil (pendapatan

nasional) untuk jangka menengah maupu jangka panjang.⁶Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa ekspansi moneter tidak bersifat kurang mencukupi atau berlebihan, tetapi cukup untuk untuk sepenuhnya memanfaatkan kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang-barang dan jasa bagi kesejahteraan yang berbasis luas.⁷

Dalam teori Keynes, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan mekanisme yang memindahkan dorongan sektor moneter ke sektor riil .Dimana kebijakan moneter ditransmisikan melalui jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.⁸ Sedangkan pada transmisi kebijakan moneter syariah menggunakan jalur pembiayaan bank syariah dengan sasaran akhir output riil (pendapatan nasional), karena dianggap bersinggungan langsung dengan sektor riil.Pembiayaan bank syariah berpotensi meningkatkan produktifitas barang dan jasa yang ada di sektor riil, misalnya saja pembiayaan *murabahah* yang berbasis jual beli barang dan jasa atau pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang berbasis bagi hasil atas usaha komersial di sektor riil.

Menurut Ascarya⁹, transmisi kebijakan moneter melalui jalur pembiayaan bank syariah memiliki hubungan positif dengan output riil. Dalam temuannya Ascarya menyatakan bahwa transmisi kebijakan moneter dengan instrumen syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), Pembiayaan (FINC), bagi hasil

⁶ Solikin M. Juhro, Darsono, Ferry Syarifuddin, *Kebijakan Moneter Syariah Dalam Sistem Moneter Ganda: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Tazkia Publishing: 2018), hal 111

⁷ Anisa Noviasari, “Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia”, *Jurnal Media Ekonomi* Vol.20 No.3, 2012, hal. 31

⁸ Perry Warjiyo, Solikin, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2003), hal. 19

⁹Ascarya, “Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia, *Jurnal Bulletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2012, hal. 311-312

(*Profit Loss sharing*) lebih efektif dalam pengurangan inflasi dan meningkatkan output riil (pendapatan nasional). Sebaliknya transmisi kebijakan moneter dengan menggunakan instrument konvensional yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), kredit (LOAN), suku bunga (*Interest*) secara alamiah memicu inflasi dan menghambat pertumbuhan output riil. Hal ini dikarenakan sistem suku bunga dalam transmisi kebijakan moneter konvensional memberikan dampak negatif terhadap output, sedangkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) memberikan dampak positif yaitu mendorong kenaikan output, dikarenakan apabila bagi hasil naik maka akan menaikkan investasi yang pada akhirnya mempengaruhi output riil.

Pada transmisi kebijakan moneter melalui jalur pembiayaan bank syariah, bank Indonesia selaku otoritas moneter menggunakan instrumen Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dengan sistem pemberian bonus. Namun kemudian diganti dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan akad *ju'alah* pada tahun 2008. Pada instrument kebijakan moneter Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan akad *ju'alah*, Bank Indonesia wajib memberikan imbalan dengan nilai yang telah ditetapkan atas penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Karena penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan bentuk partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter.

Selain instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam transmisi kebijakan moneter syariah juga melibatkan interaksi antar

perbankan syariah melalui Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) adalah transaksi jangka pendek antar bank baik berupa rupiah maupun valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) sangat penting untuk menjaga likuiditas bank agar operasionalnya lancar dan sehat. Jika bank kelebihan likuiditas maka mereka akan menggunakan instrument pasar uang untuk investasi, dan apabila kekurangan likuiditas akan menerbitkan instrument untuk mendapatkan dana tunai.¹⁰

Selanjutnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah juga melibatkan interaksi antara perbankan dengan sektor riil melalui penyaluran pembiayaan. Dalam teori Schumpeter yang menyatakan bahwa *finance led growth* atau biasa disebut *suplly leading hypothesi* memperlihatkan hubungan penawaran antara sektor keuangan dengan sektor riil. Sektor keuangan dalam hal ini perbankan syariah selaku perantara keuangan berfungsi sebagai penyalur dana pihak ketiga yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana melalui sumber-sumber pendanaan yang efisien yang kemudian akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi dan memacu pertumbuhan sektor riil.¹¹

Menurut Solikin¹², Jumlah *fee* pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berperan dalam *policyrate* untuk bank syariah yang akan mempengaruhi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan kemudian

¹⁰Solikin M. Juhro, Darsono, Ferry Syarifuddin, *Kebijakan Moneter Syariah.....*, hal.

¹¹ Linda Tamim Umairah Hasyim, “Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor riil di Indonesia” *Jurnal Akuntansi* Vol, 8, No.1, 2016, hal.22

¹², Solikin M. Juhro, Darsono, Ferry Syarifuddin, *Kebijakan Moneter Syariah Dalam Sistem Moneter Ganda: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Tazkia Publishing: 2018), hal.

mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan dalam menyalurkan pembiayaannya yang pada akhirnya berdampak terhadap sektor riil.

Salah satu indikator dalam perhitungan pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*). Produk Domestik Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Tabel 1.1
Data Instrument Moneter Syariah, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Perbankan dan Produk Domestik Bruto (PDB)

Tahun	SBIS (miliar)	PUAS (%)	DPK (miliar)	FINC (miliar)	PLS (%)	PDB (miliar)
2010	5408	5,8	723407	82486	31,91	6864133
2011	9244	5,08	1073122	1019219	29,69	7287635
2012	4933	4,42	1486960	1448467	28,34	7727083
2013	6699	6,25	1984053	2037200	27,91	8156497
2014	8130	6,3	2326956	2297667	34,3	8564866
2015	6275	6,05	2600142	2455758	23,56	8982517
2016	10788	6,08	2973133	2690911	23,36	9434613
2017	10017	4,31	3646260	3154775	21,39	9912703
2018	8268	5,87	4143757	3589909	18,98	10425316
2019	10386	3,56	4657832	4019674	18,07	10949243

Sumber: Statistik Perbankan Syariah-OJK¹³, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia-BI¹⁴, diambil tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mengalami fluktuasi per tahunnya, dimana terjadi penurunan di tahun 2012 sebesar 4311 miliar rupiah, tahun 2015 sebesar 1,855 miliar rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 1,749 miliar rupiah. Hal ini diikuti oleh

¹³Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx>, diakses pada 5 Juli 2020 pukul 10.23 WIB

¹⁴Bank Indonesia, “Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia”, dalam <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/bulanan/Default.aspx>, diakses 5 Juli 2020 pukul 12.30 WIB

tingkat imbal hasil Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) terjadi penurunan pada tahun 2012 sebesar 0,66 % dan pada tahun 2015 sebesar 0,25 %. Berbeda dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), jumlah dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan (FINC) terus mengalami kenaikan per tahunnya, diikuti oleh jumlah Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk *profit loss sharing* (PLS) cenderung mengalami penurunan per tahunnya, dan kenaikan hanya terjadi pada tahun 2014.

Berdasarkan data jumlah dana pihak ketiga (DPK) dan jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah yang terus mengalami kenaikan, diikuti oleh jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai representasi dari pendapatan nasional menarik minat penulis untuk meneliti lebih dalam apakah pembiayaan bank syariah mampu memberikan arah positif terhadap laju pertumbuhan pendapatan nasional. Sedangkan jumlah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) yang mengalami penurunan dan peningkatan dalam satu periode mengindikasikan bahwa SBIS berperan dalam rate kebijakan untuk bank syariah yang akan mempengaruhi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam.

Dalam penelitian Fitriani¹⁵, menyebutkan bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan untuk memprediksi nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam jangka pendek juga terdapat pengaruh Sertifikat Bank

¹⁵ Yunie Fitriani, Roikhan M Aziz, "Keterkaitan Indikator Moneter Syariah Terhadap Pendapatan Domestic Bruto", *Jurnal Signifikan* Vol 1 No. 1, 2012, hal. 51

Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan untuk variabel pembiayaan bank syariah dalam jangka pendek tidak terdapat pengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berbeda dengan penelitian Roedyhantoro dimana variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan diatas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dengan judul **“Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia periode 2010-2019”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah perlu adanya identifikasi masalah agar penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan agar pembahasan lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mengenai analisis efektifitas mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan bank syariah. Identifikasi masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam sepuluh terakhir mengalami penurunan dan kenaikan atau berfluktuatif setiap tahunnya.
2. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dalam sepuluh tahun akhir cenderung mengalami penurunan dan kenaikan atau berfluktuatif mengikuti imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

3. Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam sepuluh tahun terakhir terus mengalami kenaikan per tahunnya diikuti dengan kenaikan jumlah pembiayaan syariah yang disalurkan.
4. Pembiayaan syariah (FINC) dalam sepuluh terakhir terus mengalami kenaikan per tahunnya mengikuti kenaikan jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).
5. Profit Loss Sharing (PLS) dalam sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.
6. Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai representasi pendapatan nasional terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah sertifikat bank Indonesia (SBIS) berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019?
2. Apakah pasar uang antar bank syariah (PUAS) berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019?
3. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019?
4. Apakah jumlah pembiayaan (FINC) berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019?

5. Apakah *profit loss sharing* (PLS) berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019.
2. Untuk menguji pengaruh Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019.
3. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019.
4. Untuk menguji pengaruh jumlah pembiayaan (FINC) terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019.
5. Untuk menguji pengaruh *profit loss sharing* (PLS) berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang direpresentasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010-2019.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian penelitian terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pola hubungan transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan bank syariah terhadap pendapatan nasional sebagai acuan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Untuk Bank Indonesia dan Bank Syariah

Untuk pengambil kebijakan hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sedangkan untuk lembaga keuangan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan-keputusan terkait dengan penyaluran pembiayaan ke sektor riil yang diharapkan bisa berdampak positif terhadap pendapatan nasional.

- b. Untuk akademis

Diharapkan setelah dilakukan penelitian ini dapat menambah koleksi kepustakaan IAIN Tulungagung untuk dijadikan referensi mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur pembiayaan bank syariah terhadap pendapatan nasional, bagi mahasiswa khususnya jurusan perbankan syariah.

- c. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian dapat menjadi literature dan acuan khususnya mengenai mekanisme transmisi

kebijakan moneter jalur pembiayaan bank syariah terhadap pendapatan nasional.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup

Penelitian memiliki ruang lingkup dan batasan-batasan agar pembahasan dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Ruang lingkup pada penelitian adalah variable-variabel yang diteliti, populasi dan juga sampel berupa laporan keuangan yaitu variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dana pihak ketiga (DPK), jumlah pembiayaan (FINC), *Profit Loss Sharing* (PLS) dan Produk Domestik Bruto (PDB).

2. Keterbatasan penelitian

Batasan masalah digunakan bertujuan untuk memfokuskan variabel-variabel yang telah ditentukan untuk dibahas serta terhindar dari tidak terkendalinya suatu pembahasan yang berlebihan yang keluar dari judul yang diajukan. Keterbatasan penelitian yaitu terdapat pada data Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dana pihak ketiga (DPK), jumlah pembiayaan (FINC), profit loss sharing (PLS) dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diambil dalam rentang waktu 10 tahun yaitu pada tahun 2010-2019 pada laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).

G. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat bank Indonesia syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang memiliki jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.¹⁶

b. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Pasar uang antar bank syariah adalah instrument keuangan berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dimaksudkan sebagai sarana investasi antar bank syariah sehingga bank syariah tidak diperkenankan menanamkan dana pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan bunga.¹⁷

c. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.¹⁸

d. Pembiayaan (FINC)

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

¹⁶ Bank Indonesia, "Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah" Dalam <http://www.bi.go.id>, diakses 5 Juli 2020

¹⁷Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal 225

¹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 43

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

e. *Profit Loss Sharing*(PLS)

Profit loss sharing atau bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun anatara bank dengan penerima dana.²⁰

f. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (PDB) atau *Gross domestic product* adalah nilai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan factor-faktor produksi di wilayah suatu Negara (domestic) selama satu tahun. Produk Domestik Bruto biasanya digunakan sebagai indicator untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.²¹

2. Definisi Operasional

Dari penjelasan secara konseptual diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Jalur Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pendapatan Nasional periode 2010-2019 adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui proses bekerjanya instrument transmisi kebijakan moneter syariah jalur

¹⁹ Ibid., hal.84

²⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 124

²¹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* , (Jakarta: KENCANA, 2017), Hal. 232

pembiayaan bank syariah yang direpresentasikan oleh variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), Dana Pihak Ketiga (DPK), jumlah pembiayaan (FINC), *Profit Loss Sharing*(PLS) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) periode 2010-2019 yang dilihat dari masing-masing variabelnya.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halama sampul depan, halaam judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari 6 (enam) bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang mencakup teori yang membahas variabel pertama, teori yang membahas variabel kedua, dan seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, (c) sampling dan sampel penelitian, (d) sumber data, (e) variabel dan skala pengukurannya, (f) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum dan pembahasan singkat mengenai temuan penelitian.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban dari hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahsan, implikasi penelitian, dan memberikan saran bagi peneliti yang akan datang.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.